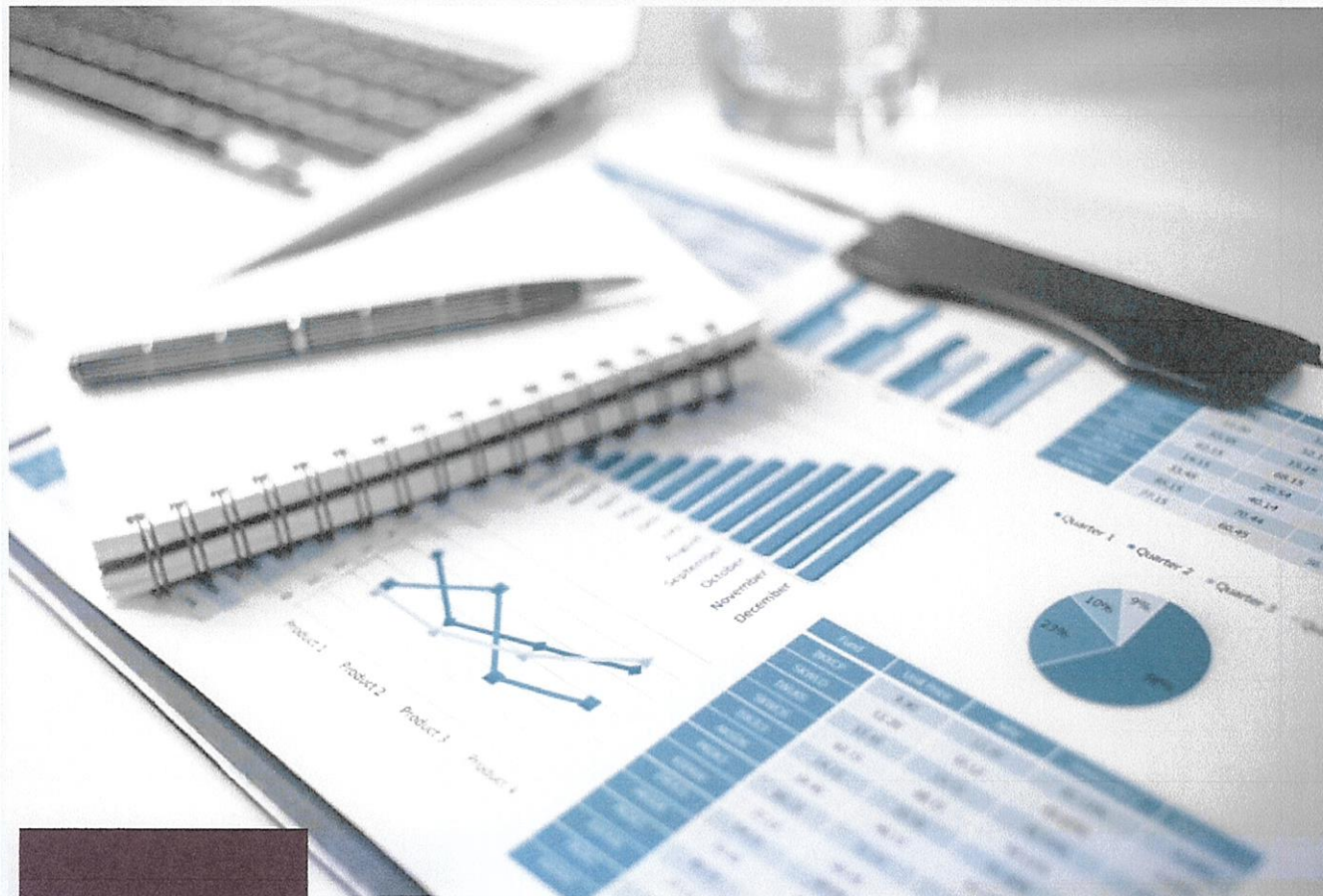




LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 AUDITED



2024

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(099066)
JALAN SULTAN ABDURRAHMAN NO.89
PONTIANAK

PENGANTAR

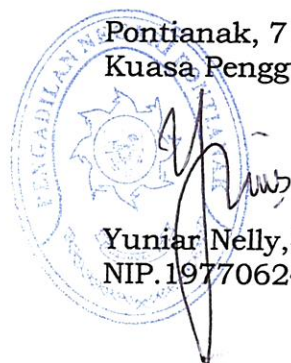
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099066) Tahun 2024 UnAudited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 7 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Yuniar Nelly, S.T.M.M.
NIP.19770624 200604 2 001

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional (LO)	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
D Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	33
E Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	36
F Pengungkapan Penting Lainnya	41
IV Lampiran dan Daftar Tabel	
A Daftar Tabel	IV
B Daftar Lampiran	V
C Laporan Barang Pengguna	VI
D Laporan Akumulasi Penyusutan Barang	VII
E Laporan BMN di Neraca	VIII
F Laporan BMN di Neraca (Saldo Awal)	IX
G Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	X
H Rekening Koran	XI
I Berita Acara Opname Fisik Persediaan	XII

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jalan Sultan Abdurahman N0.89

Telp. (0561)-732100, E-mail : pengadilannegeriptk@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099066) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Yuniar Nelly, S.T.M.M.

NIP.19770624 200604 2 001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	14,107,801,928
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	17,543,967	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	17,543,967
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,913,897,680	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,829	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	201,264,790	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	71,372,014	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,141,400,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	462,766,250	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	155,340,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	460,322,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,235,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	182,250,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	4,052,150,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,023,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	530	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,320	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	800,464	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,140,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	842,827,121	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,720,410	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,944,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,543,750	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,300,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,729,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,280,345	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	24,449,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	189,825,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	630,996,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88,190,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,206,878	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85,478,335	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,050,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,528

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:49 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			14,125,347,423	14,125,347,423

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	30,529,900	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	29,577,200	0
0.0	131111	Tanah	48,759,467,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,401,620,966	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,304,747,414
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,589,680,951
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,114,864
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	3,895,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,069,200
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	826,833
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,107,801,928
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,543,967	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,480,000
0.0	391111	Ekuitas	0	62,225,668,806
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,449,862,286	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	728,028,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,717,134
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,913,897,680	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,301	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	201,264,790	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,372,014	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,141,400,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	462,766,250	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	155,340,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	461,136,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,235,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	182,250,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	4,052,150,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	40,023,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	530	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,320	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	800,464	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:48 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,140,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	840,168,671	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,720,410	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40,944,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,543,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,300,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,090,424	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	24,840,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	189,825,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	630,996,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88,190,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,206,878	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	85,478,335	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,050,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	483,036,517	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,020,404,656	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	57,533,800	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22,326,800	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	5,182,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	119,713,848	0
JUMLAH			90,010,030,130	90,010,030,130

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null
Yuniar Nelly, ST,MM
NIP 197706242006042001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	60,107,100	40,238,700	19,868,400	49.38
JUMLAH ASET LANCAR	60,107,100	40,238,700	19,868,400	49.38
ASET TETAP				
Tanah	48,759,467,000	54,166,769,000	(5,407,302,000)	(9.98)
Peralatan dan Mesin	6,401,620,966	5,628,040,966	773,580,000	13.75
Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	13,877,226,700	(259,380,000)	(1.87)
Aset Tetap Lainnya	9,839,869	9,839,869	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,894,428,365)	(11,488,839,058)	(1,405,589,307)	12.23
JUMLAH ASET TETAP	55,894,346,170	62,193,037,477	(6,298,691,307)	(10.13)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,114,864	3,114,864	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,114,864)	(3,114,864)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	55,954,453,270	62,233,276,177	(6,278,822,907)	(10.09)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,964,200	7,607,371	(1,643,171)	(21.60)
Pendapatan Diterima Dimuka	826,833	0	826,833	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,791,033	7,607,371	(816,338)	(10.73)
JUMLAH KEWAJIBAN	6,791,033	7,607,371	(816,338)	(10.73)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	55,947,662,237	62,225,668,806	(6,278,006,569)	(10.09)
JUMLAH EKUITAS	55,947,662,237	62,225,668,806	(6,278,006,569)	(10.09)
JUMLAH EKUITAS	55,947,662,237	62,225,668,806	(6,278,006,569)	(10.09)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55,954,453,270	62,233,276,177	(6,278,822,907)	(10.09)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA

Yuniar Nelly, ST,MM
NIP 197706242006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	62,225,668,806	63,277,838,561	(1,052,169,755)	(1.66)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15,673,910,244)	(14,933,464,466)	(740,445,778)	4.96
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(5,449,862,286)	(73,635,315)	(5,376,226,971)	7,301.15
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,449,862,286)	(73,635,315)	(5,376,226,971)	7,301.15
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,845,765,961	13,954,930,026	890,835,935	6.38
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,278,006,569)	(1,052,169,755)	(5,225,836,814)	496.67
EKUITAS AKHIR	55,947,662,237	62,225,668,806	(6,278,006,569)	(10.09)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

null

Yuniar Nelly, ST,MM

NIP 197706242006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:45 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,717,134	16,196,003	521,131	3.218
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,717,134	16,196,003	521,131	3.218
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,717,134	16,196,003	521,131	3.218
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,786,076,089	11,202,873,738	583,202,351	5.206
Beban Persediaan	57,533,800	55,763,700	1,770,100	3.174
Beban Barang dan Jasa	1,152,432,455	1,122,639,016	29,793,439	2.654
Beban Pemeliharaan	978,901,678	1,008,882,906	(29,981,228)	(2.972)
Beban Perjalanan Dinas	92,528,335	120,748,286	(28,219,951)	(23.371)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

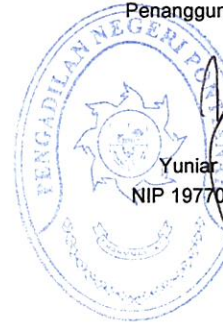
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,503,441,173	1,438,752,823	64,688,350	4.496
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,570,913,530	14,949,660,469	621,253,061	4.156
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,554,196,396)	(14,933,464,466)	(620,731,930)	4.157
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(119,713,848)	0	(119,713,848)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	119,713,848	0	119,713,848	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(119,713,848)	0	(119,713,848)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15,673,910,244)	(14,933,464,466)	(740,445,778)	4.958
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,673,910,244)	(14,933,464,466)	(740,445,778)	4.958

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA



full

Yuniar Nelly, ST,MM

NIP 197706242006042001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099066

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:46 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,018,000	17,543,967	(474,033)	97.37	11,640,000	13,363,920	1,723,920	114.81
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,018,000	17,543,967	(474,033)	97.37	11,640,000	13,363,920	1,723,920	114.81
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	18,018,000	17,543,967	(474,033)	97.37	11,640,000	13,363,920	1,723,920	114.81
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	14,543,644,000	14,107,801,928	(435,842,072)	97.00	14,302,207,000	13,714,663,946	(587,543,054)	95.89
2. Belanja Barang	12,188,936,000	11,785,262,089	(403,673,911)	96.69	11,766,753,000	11,199,792,738	(566,960,262)	95.18
3. Belanja Modal	2,330,708,000	2,298,539,839	(32,168,161)	98.62	2,317,254,000	2,296,671,208	(20,582,792)	99.11
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	24,000,000	24,000,000	0	100.0	218,200,000	218,200,000	0	100
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099066

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:46 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,543,644,000	14,107,801,928	(435,842,072)	97.00	14,302,207,000	13,714,663,946	(587,543,054)	95.89
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null
Yuhlar Nelly, ST,MM
NIP 19706242006042001

**RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,913,897,680
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,829
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1,528
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	201,264,790
511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,372,014
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,141,400,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	462,766,250
511126	Beban Tunj. Beras PNS	155,340,900
511129	Beban Uang Makan PNS	461,136,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,235,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	182,250,000
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	4,052,150,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	40,023,200
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	530
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,320
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	800,464
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,041,640
511628	Beban Uang Makan PPPK	7,140,000

JUMLAH	11,786,076,089
--------	----------------

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2024	2023
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	14,107,801,928	13,714,663,946
313121	Diterima dari Entitas Lain	-17,543,967	-13,363,920
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	27,480,000	58,364,500
391131	Pengesahan Hibah Langsung	728,028,000	195,265,500
JUMLAH		14,845,765,961	13,954,930,026

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited satker Pengadilan Negeri Pontianak ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.543.967 atau mencapai 82 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.018.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp14.107.801.928 atau mencapai 97,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.543.644.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember Tahun 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.954.453.270 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp60.107.100; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp55.894.346.170; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp904.503.329 dan Rp55.947.662.237.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.717.134 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.570.913.530 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp15.673.910.244, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga Entitas mengalami Defisit-LO Rp15.673.910.244.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari Tahun 2024 adalah sebesar Rp62.225.668.806 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp15.673.910.244 ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp(5.449.862.286) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.845.765.961 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp55.947.662.237.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai pada 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 Audited disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2024 AUDITED				TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
Pendapatan	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.018.000	17.543.967	(474.033)	97,37	13.363.920
Jumlah Pendapatan		18.018.000	17.543.967	(474.033)	97,37	13.363.920
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	12.188.936.000	11.785.262.089	(403.673.911)	96,69	11.199.792.738
Belanja Barang	B.4	2.330.708.000	2.298.539.839	(32.168.161)	98,62	2.298.671.208
Belanja Modal	B.5	24.000.000	24.000.000	0	100	218.200.000
Jumlah Belanja		14.543.644.000	14.107.801.928	(435.842.072)	97	13.714.663.946

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NERACA PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CAT.	Tahun 2024 Audited	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di BendaharaPengeluaran	C.1.1	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	0	0
Persediaan	C.1.3	60.107.100	40.238.700
JUMLAH ASET LANCAR		60.107.100	40.238.700
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	48.759.467.000	54.166.769.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.401.620.966	5.628.040.966
Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.617.846.700	13.877.226.700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	9.839.869	9.839.869
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(12.067.261.332) (12.894.428.365)	(11.488.839.058)
JUMLAH ASET TETAP		55.894.346.170	62.193.037.477
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain Lain	C.3.1	3.114.864	3.114.864
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(3.114.864)	(3.114.864)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		55.954.453.270	62.233.276.177
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	5.964.200	7.607.371
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	826.833	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.791.033	7.607.371
JUMLAH KEWAJIBAN		6.791.033	7.607.371
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	55.947.662.237	62.225.668.806
JUMLAH EKUITAS		55.947.662.237	62.225.668.806
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		55.954.453.270	62.233.276.177

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	Tahun 2024 Audited	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.717.134	16.196.003
JUMLAH PENDAPATAN		16.717.134	16.196.003
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.786.076.089	11.202.873.738
Beban Persediaan	D.3	57.533.800	55.763.700
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.152.432.455	1.122.639.016
Beban Pemeliharaan	D.5	978.901.678	1.008.882.906
Beban Perjalanan Dinas	D.6	92.528.335	120.748.286
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.503.441.173	1.438.752.823
JUMLAH BEBAN		15.570.913.530	14.949.660.469
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15.554.196.396)	(14.933.464.466)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		(119.713.848)	0
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(119.713.848)	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	(119.713.848)	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(119.713.848)	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(15.673.910.244)	(14.933.464.466)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
Beban Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(15.673.910.244)	(14.933.464.466)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	Tahun 2024 Audited	2023
EKUITAS AWAL	E.1	62.225.668.806	63.277.838.561
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15.673.910.244)	(14.933.464.466)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(5.449.862.286)	(73.635.315)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	(5.449.862.286)	(73.635.315)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	14.845.765.961	13.954.930.026
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.278.006.569)	(1.052.169.755)
EKUITAS AKHIR	E.7	55.947.662.237	62.225.668.806

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.

Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian procedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Kantor Pengadilan Negeri Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Pontianak pada Tahun 2024 Audited merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak. Visi Mahkamah Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Pontianak sebagai visi dan misinya.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Pontianak adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja yaitu:

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan (LRA)

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Peyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran Tahun 2024 Audited sebesar Rp14.543.644.000 Selama Tahun 2024 Audited, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak yang disebabkan adanya Revisi Halaman III Terkait Proyeksi rencana penarikan dana Triwulanan yang telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali . Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran Tahun 2024 Audited	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	18.018.000	18.018.000
Jumlah Pendapatan	18.018.000	18.018.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.461.618.000	12.188.936.000
Belanja Barang	2.330.708.000	2.330.708.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	13.792.326.000	14.543.644.000

Catatan :

1. Pengadilan Negeri Pontianak selama Tahun 2024 Audited telah melakukan revisi perubahan DIPA sebanyak 4 Kali
2. Revisi dilakukan dalam hal proyeksi rencana penarikan dana Triwulan I sampai dengan Tahunan Tahun 2024 Audited.

3. Revisi dalam hal pergeseran detail terkait minus dalam belanja pegawai serta pergeseran untuk optimalisasi anggaran.

Pendapatan
Rp17.543.967

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.543.967. Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh pendapatan dari sewa rumah dinas.

Realisasi
Belanja
Rp14.107.801.928.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp14.107.801.928 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp14.543.644.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel II
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 Audited
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran Tahun 2024 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12.188.936.000	11.785.282.089	96,59
Belanja Barang	2.330.708.000	2.298.539.839	98,62
Belanja Modal	24.000.000	24.000.000	0
Total Belanja Kotor	14.543.644.000	14.107.801.928	97
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah	14.543.644.000	14.107.801.928	97

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun 2024 tidak terdapat Pagu Belanja Modal.
2. Penurunan realisasi Belanja Pegawai dikarenakan adanya mutasi dan promosi pegawai Pengadilan Negeri Pontianak ke satker lainnya.

3. Serta peningkatan/percepatan belanja operasional telah sesuai target yang ditetapkan.

Tabel III
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023
Belanja Pegawai	11.785.282.089	11.199.792.738
Belanja Barang	2.298.539.839	2.296.671.208
Belanja Modal	24.000.000	218.200.000
Jumlah Belanja	14.107.801.928	13.714.663.946

Menurunnya realisasi belanja terjadi di belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal.

B.2. Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp11.785.262.089

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.785.262.089 dan Rp11.199.792.738. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2024 Audited mengalami penurunan sebesar 5 persen dari . Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perubahan jumlah PNS pada Tahun 2024 Audited yang mengalami penurunan karena promosi dan mutase maupun pension.
2. Perubahan jumlah Hakim Ad Hoc yang mengalami penurunan karena promosi dan mutas1 maupun pensiun.

Tabel IV
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2024 Audited	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.794.071.731	11.199.792	(0,49)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	46.080.740	0	0
Jumlah Belanja Kotor	8.840.152.471	8.844.501.921	(0,49)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	8.840.152.471	8.844.501.921	(0,49)

Belanja Barang
Rp.1.794.172.0
26

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 30 September Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.794.172.026 dan Rp960.792.915. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 Audited mengalami peningkatan sebesar persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pemeliharaan sub kelompok akun 5231 , terjadi kenaikan pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor dan peralatan dan mesin dikarenakan tingkat kerusakan Gedung dan Bangunan , dan peralatan dan mesin yang meningkat pada Tahun 2024 Audited ini;

Tabel V
Perbandingan Belanja Barang
September 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Belanja Barang Operasional	657.804.649	642.530.204	2,37
Belanja Barang Non Operasional	20.300.000	12.974.000	56,46
Belanja Barang Persediaan	72.976.700	56.873.700	28,31
Belanja Jasa	148.198.832	140.669.289	5,35
Belanja Pemeliharaan	810.269.868	620.151.686	30,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	66.621.977	64.930.304	2,60
Jumlah Kotor	1.794.172.026	1.538.129.183	16,64
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	1.794.172.026	1.538.129.183	16,64

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat Pagu Belanja Modal pada Tahun 2024 Audited

Berikut rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023:

Tabel VI
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0

Tidak terdapat Pagu Belanja Modal pada Tahun 2024 Audited. Adapun perbandingan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 Audited	Semester 1 Tahun 2023	%
Printer	0	0	0
Laptop	0	0	0
Sarana Disabilitas	0	0	0
Sepeda Motor	0	0	0
Personal Computer (PC)	0	0	0
Meubelair	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023:

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
--------	-----------------------	------------	---

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp60.107.100

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp60.107.100 dan Rp40.238.700. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023
Kas Tunai	60.000.000	0
Kas Bank di Bank BRI No. Rek. 65324401961100	0	0
Kuitansi di Bendahara	0	0
Jumlah	60.000.000	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak
Rp990.395

Piutang Bukan Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Saldo Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023
Sewa Rumah Dinas bulan Oktober 2024	990.395	0
Jumlah	990.395	0

Persediaan
Rp47.191.700

C.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp47.191.700 dan Rp40.238.700 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VII
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Barang Konsumsi	47.191.700	40.238.700	17,28
Barang Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	47.191.700	40.238.700	17,28

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp55.894.346.1
70

Saldo Aset Tetap Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.894.346.170 dan Rp62.193.037.477. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp54.167.515.0
00

Tanah yang di miliki Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp54.167.515.000 dan Rp54.166.769.000.

Mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 1 Januari 2024	54.166.769.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember Tahun 2024 Audited	54.167.515.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember Tahun 2024 Audited	
54.167.515.000	54.167.515.000

Tabel IX
Rincian Tanah Tahun 2024 Audited

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	879 m2	Jalan Untung Suropati	5.408.048.000
2	2.082 m2	Jalan Sudimoro	8.135.902.000
3	806 m2	Jalan Alianyang GG. Kurnia	1.128.248.000
4	220 m2	Jalan Gusti Hamzah	717.970.000
5	1.990 m2	Jalan Sulawesi	8.167.504.000
6	2.887 m2	Jalan Sultan Abdurrahman	23.480.670.000
7	1.266 m2	Jalan Uray Bawadi	7.128.427.000
8	599 m2	Jalan K.S Tubun Gg.Flamboyan No.4	746.000
Jumlah			54.167.515.000

Tanah seluas tersebut merupakan tanah yang digunakan untuk gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Pontianak. Rincian Tanah beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp5.764.740.96
6

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp5.764.740.966 dan Rp5.628.040.966. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel X
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember Tahun 2024	5.628.040.966
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah	136.700.000
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang	

Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember Tahun 2024 Audited	5.764.740.966
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember Tahun 2024 Audited	(4.982.794.634)
Nilai Buku per 31 Desember Tahun 2024 Audited	781.946.332

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

Rincian Peralatan dan Mesin beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp13.617.846.7
00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan aset tetap. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp13.617.846.700 dan Rp13.877.226.700 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2024	13.467.553.000
Mutasi Tambah :	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Reklas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember Tahun 2024 Audited	13.617.846.700

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember Tahun 2024 Audited	(7.084.466.698)
Nilai Buku per 31 Desember Tahun 2024 Audited	6.533.380.002

Terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 Audited dibandingkan Tahun 2023.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember Tahun 2024 Audited	308.073.700
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
Reklas ke Klasifikasi Gedung dan Bangunan	0
Saldo per 31 Desember Tahun 2024 Audited	0

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Terdapat pengurangan jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun ini karena adanya Reklasifikasi ke dalam Kelompok Aset Gedung dan Bangunan..

Rincian Jalan, Irigasi , dan Jaringan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp3.114.864

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 34 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.114.864 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember Tahun 2024	3.114.864
Audited	
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
-	0

Saldo per 31 Desember Tahun 2024	3.114.864
Audited	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	3.114.864
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jenis aset tetap lainnya pada tahun ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi
Penyusutan
Rp12.067.261.332
32)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp12.067.261.332 dan Rp11.488.839.058. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024:

Tabel XII
Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	AKM. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	54.167.515.000	0	54.167.515.000
2	Peralatan dan Mesin	5.764.740.966	(4.982.794.634)	781.946.332
3	Gedung dan Bangunan	13.617.846.700	(7.084.466.698)	6.533.380.002
4	Jalan, Irigasi, dan Bangunan	0	0	0

5	Aset tetap Lainnya	9.839.869	0	9.839.869
Jumlah		73.559.942.535	12.067.261.332	61.492.681.203

Rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp968.581.805*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 30 September Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp968.581.805 dan Rp7.607.371.

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp901.301.805*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 30 September Semester 1 Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp901.301.805 dan Rp7.607.371. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XIII

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024 Audited

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	868.301.805
2	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	33.000.000
Jumlah		901.301.805

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayarkan dan Belanja Barang yang masih harus dibayarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai berupa gaji Induk PNS bulan Oktober 2024 yang diajukan pada bulan September 2024;
2. Belanja Barang berupa Tagihan Air, Telpon, Internet yang merupakan merupakan pemakaian bulan September 2024 Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Oktober 2024.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp7.280.000

C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh Satker dengan dokumen sumber BAST/Surat Penagihan/kuitansi UP yang belum di SPM kan. Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan per 30 September Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp7.280.000 dan Rp0. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan adalah sebagai berikut:

Tabel XIV

Rincian Utang yang belum ditagihkan Tahun 2024 Audited

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kuitansi UP yang belum di SPMkan	7.280.000
Jumlah		7.280.000

Kuitansi UP yang belum di SPMkan merupakan bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan kepada KPPN yang dicatat sebagai pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran serta tercatat sebagai pengeuaran akrual oleh Neraca.

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.000

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 30 September Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel XV
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Uang Persediaan (UP)	60.000.000
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0
Jumlah		60.000.000

C.4. Ekuitas

Ekuitas
Rp55.947.662.237
37

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp55.947.662.237 dan Rp62.225.668.806. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp15.736.253

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan per 30 September Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.717.134 dan Rp13.968.683.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp9.705.371.748
8

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp9.705.371.748 dan Rp9.548.469.907. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Beban pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel XVI
Rincian Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Gaji Pokok	2.913.897.680	2.816.196.320	2,01
Pengem. Beban Pembulatan	(1.528)	(386)	(495,8 5)
Beban Pembulatan	36.829	40.970	(11,80)
Beban Tunj. Suami/Istri	201.264.790	212.208.288	(5,69)
Beban Tunj. Anak	71.372.014	71.788.935	(1,35)
Beban Tunj. Struktural	40.320.000	40.320.000	0
Beban Tunj. Fungsional	3.141.400.000	3.707.220.000	(23,45)
Beban Tunj. PPh	462.766.250	503.374.569	(9,56)
Beban Tunj. Beras	155.340.900	164.465.820	(6,45)
Beban Uang Makan	461.136.000	457.391.000	(2,29)
Beban Tunj. Umum	44.235.000	29.810.000	43,02
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	182.250.000	237.600.000	(92,70)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	4.052.150.000	2.945.950.000	36,39
Beban Gaji Pokok PPPK	40.023.200	10.588.800	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	530	0	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.002.320	1.058.880	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	800.464	211.820	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	1.400.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640	869.172	0
Beban Uang Makan PPPK	7.140.000	2.485.000	0
Jumlah Beban	11.786.076.089	11.202.873.738	1,64

Kenaikan Beban Pegawai sesuai rincian perbandingan diatas terdapat pada sebagian besar beban tunjangan, antara lain Beban

Tunjangan Gaji Pokok, Beban Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan PPH dan Tunjangan Kemahalan Hakim, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Pontianak sehingga terjadi kekosongan jabatan tersebut;

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp50.128.800*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp50.128.800 dan 35.643.700. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XVII

Rincian Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	50.128.800	35.643.700	40,63
Jumlah Beban	50.128.800	35.643.700	40,63

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp878.414.110*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp878.414.110 dan Rp576.580.542. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Berikut rincian perbandingan beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 :

Tabel XVIII

Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	658.083.749	622.456.254	5,72
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.977.450	362.000	446,25
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30.708.000	42.776.000	28,21
Beban Barang Operasional Lainnya	21.014.000	7.277.500	188,75
Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	0	12.974.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.300.000	0	0
Beban Langganan Telepon	1.476.411	1.519.368	(2,82)
Beban Langganan Air	16.589.500	9.771.500	69,77
Beban Sewa	128.265.000	128.127.500	0,10
Jumlah Beban	878.414.110	825.264.122	6,44

Penurunan Beban barang dan Jasa di hampir terjadi di seluruh rincian, dikarenakan sebagai berikut :

1. Turunnya Beban Barang Maupun Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 terjadi dikarenakan pada tidak ada lagi Beban tersebut pada Tahun ini;
2. Turunnya Beban Barang Non Operasional lainnya disebabkan oleh karena perpindahan dimana sebelumnya belanja keperluan sehari-hari kantor lainnya berpindah kedalam akun detail Beban Keperluan Perkantoran;
3. Turunnya Beban Barang Maupun Jasa Langganan Listrik terjadi dikarenakan tagihan Listrik satker telah diambil alih oleh Eselon 1 sehingga tidak ada lagi Beban tersebut pada Tahun ini;

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp832.989.768

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp832.989.768 dan Rp653.827.686. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IXX
Rincian Perbandingan Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	564.516.000	414.065.600	36,33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	87.390.000	90.950.000	(3,91)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.006.868	133.446.586	19,90
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15.894.900	15.365.500	3,44
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	5.182.000	0	0
Jumlah Beban	832.989.768	653.827.686	27,40

Kenaikan Beban Pemeliharaan disebabkan karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tahun ini, begitu juga Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik diakibatkan meningkatnya frekuensi penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan peralatan mesin TIK sudah 4 (empat) tahun dalam penggunaan sehingga memerlukan pemeliharaan lebih tinggi dari sebelumnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp66.621.977

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp66.621.977 dan Rp64.930.304. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan frekuensi rapat koordinasi secara offline dan adanya pelatihan dari Tingkat Banding yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XX
Rincian Perbandingan Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	62.271.977	61.630.304	1,04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.350.000	3.300.000	31,81
Jumlah Beban	66.621.977	64.930.304	2,60

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.503.441.173

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.503.441.173 dan Rp1.438.752.823. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI
Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	202.898.023	203.733.348	(0,41)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	515.190.403	513.192.255	0,39
Jumlah Penyusutan	Rp1.503.441.173	Rp1.438.752.823	4,49
-			
Jumlah Amortisasi	0		
Jumlah Beban	Rp1.503.441.173	Rp1.438.752.823	4,49

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel XXII
Rincian Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024 Audited	Tahun 2023	%
Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Jumla	0	0	0

D.9. Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari pos luar biasa untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember Tahun 2024 Audited.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp62.225.668.806*

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp62.225.668.806 dan Rp63.277.838.561.

E.2. Surplus/Defisit-LO

*Defisit-LO
Rp15.673.910.244*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing adalah defisit sebesar Rp15.673.910.244 dan Rp8.910.692.126. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0*

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Koreksi yang
menambah/men
urangi ekuitas
Rp0*

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp14.845.765.9
61

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp14.845.765.961 dan Rp10.407.345.664. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel XXIII
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.107.801.928
Diterima Dari Entitas Lain	(17.543.967)
Transfer Masuk	27.480.000
Pengesahan Hibah Langsung	728.028.000
Jumlah	14.845.765.961

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp17.543.967 sedangkan DKEL sebesar Rp14.107.801.928.

E.5.2. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel XXIV
Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Biro Umum MA RI	27.480.000
Jumlah		0

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp728.028.000

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp55.947.662.2
37

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.947.662.237 dan Rp62.225.668.806.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadia Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2024 jo Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Prngguna Barang Nomor: 4139/SEK.PN.W17-U1/KU1.1.1/1/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan

Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat perubahan hingga akhir Tahun 2024.